

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang disertai dinamika pertumbuhan budaya dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan persaingan dalam berbagai hal, baik itu dalam bidang ideologi, ekonomi, maupun kemasyarakatan. Masalah ekonomi seperti masalah kemiskinan hingga saat ini masih sering terjadi dan telah menjadi isu global yang belum dapat diketahui kapan akan berakhir. Hampir semua negara berkembang, hanya sebagian penduduk yang dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya mayoritas hidup tersebut hidup miskin (Wulansari, 2017).

Pokok persoalan yang sangat mendasar adalah terletak pada invansi kebudayaan atau masuknya unsur kebudayaan asing kedalam kebudayaan setempat dengan menaklukan bangsa lain. Setidaknya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti, materialisme, hedonisme dan lain sebagainya, yang sedikit banyak mempengaruhi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku itu akan mengakibatkan perilaku manusia berubah dan perubahan yang berdampak negatif terlihat dari munculnya perilaku yang menyebabkan keresahan dalam masyarakat, misalnya keinginan pemenuhan kebutuhan material yang melimpah tanpa diimbangi kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, sehingga manusia menempuh segala cara untuk mewujudkan keinginan tersebut seperti melalui tindakan kriminal.

Namun di negara berkembang selain kemiskinan ada juga pengangguran yang semakin meningkat karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal inilah yang memicu timbulnya tindak kriminalitas dalam masyarakat. Setiap individu memiliki kehidupan yang berbeda, seperti orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Orang menganggur dan tidak berpenghasilan berarti tidak memiliki ekspektasi keuntungan dari pekerjaan legal. Karena itulah kecenderungan melakukan kejahatan orang yang menganggur lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja. Serta perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin karena perbedaan tingkat pendidikan, menimbulkan kesenjangan pendapatan yang juga merupakan salah satu faktor pendorong tingginya tingkat kriminalitas.

Tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia sedang marak terjadi, baik di media cetak atau televisi hampir setiap hari dapat di lihat berita tentang kriminalitas. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi menyangkut kriminalitas. Banyak tipe-tipe kejahatan dimasyarakat contohnya, kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila, intisitasnya masih cukup tinggi dan masih bervariasi (Wulansari, 2017). Pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang selalu dihadapi disetiap Negara. Masalah sosial ini terus terjadi bertahun-tahun dengan berbagai kebijakan untuk mengatasinya. Kriminalitas merupakan puncak permasalahan karena dampak dari kriminalitas meluas ke sektor-sektor lain seperti mengganggu pertumbuhan ekonomi Fachrurrozi et al., 2021). Konsep

pengangguran diperluas yaitu mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, juga mencakup kelompok penduduk yang aktif mencari usaha atau pekerjaan yang baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah memiliki pekerjaan, sedangkan belum mulai bekerja. Seseorang yang tidak bekerja atau kehilangan pendapatan menimbulkan masalah dalam kejahatan, dimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menimbulkan kegiatan kejahatan (BPS, 2018).

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan). Secara internasional penduduk miskin dinyatakan sebagai penduduk yang hidup dibawah standar minimum pendapatan yaitu garis kemiskinan internasional (Fachrurrozi et al., 2021). Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh BPS tahun 2018 dengan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) makanan dan non makanan. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang melakukan konsumsi per kapita dalam sebulan dengan nilai bawah garis kemiskinan (BPS, 2018).

Tujuan penghitungan kemiskinan dan jumlah keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan adalah untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijaksanaan-kebijaksanaan program-program perbaikan distribusi pendapatan, tujuan lebih lanjut adalah memperkuat dan memperbaiki kehidupan bangsa melalui Perbaikan kehidupan ekonomi (Rahardja, 2010).

Salah satu penyebab minimnya ialah kemampuan sumber daya manusia rendah seperti pendidikan yang menyebabkan upah mereka dibayar murah. Dari upah tersebut maka memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat sulit terpenuhi, belum lagi jika ada gejolak kenaikan harga-harga barang (inflasi) yang menyebabkan pendapatan rendah sehingga menekan mereka jauh lebih miskin, demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sering sekali mereka harus mengambil jalan pintas yang terlarang yaitu dengan melakukan kejahatan seperti mencuri (Sugiarti, 2014). Masalah kemiskinan tidak hanya dipelajari dari segi ekonomi semata, melainkan dari segi sosial, psikologi dan politik pula (Dulkiah et al., 2019).

Aspek ekonomi misalnya tampak dari kurang atau terbatasnya kepemilikan alat-alat produksi, upah atau gaji yang didapat rendah, dan kurangnya keterampilan sehingga tidak dapat mengatasi peluang yang ada dan tersedia, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sampai batas layak. Sementara dari segi aspek sosial misalnya karena kurangnya interaksi dan sosialisasi dalam hal informasi, tidak terintegrasikannya warga miskin kedalam institusi sosial yang ada, serta terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia serta etos kerja, selain itu juga disebabkan karena kurangnya modal sosial yang dimiliki oleh seseorang, sehingga menyebabkan mereka kekurangan kepercayaan dari orang lain serta link atau kepemilikan jaringan yang terbatas (Dulkiah et al., 2019).

Adapun aspek psikologi yang menyebabkan kemiskinan diantaranya akibat rendah diri, fatalisme (percaya diri), malas dan merasa terasing. Disisi lain,

aspek politik berkaitan dengan tinggi rendahnya akses dalam berbagai kesempatan dalam berpolitik, diskriminatif, serta tidak dapat mengeluarkan aspirasi serta pendapat dalam pengambilan keputusan. Dimensi politik yang sering muncul dalam bentuk tidak adanya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin sehingga mereka tersingkir dari proses dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Kemiskinan dapat berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Hal ini dikarenakan mata rantai kemiskinan dapat memicu dan menyebabkan timbulnya masalah lain, seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, tindak kriminalitas (pencurian, perampokan, pembunuhan, pencopetan, dan lain sebagainya) dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut, tidak sedikit masyarakat menyelesaikannya dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, yaitu dengan cara tindak kriminalitas (Dulkiah et al., 2019).

Penduduk tergolong miskin inilah yang memiliki peluang besar untuk melakukan kejahatan. Ditengah keterbatasan ekonomi mereka masih harus memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehingga sebagian penduduk miskin lebih memilih pekerjaan yang ilegal dan cukup berisiko. Namun, menghasilkan pendapatan yang lebih besar bila dibandingkan dari pekerjaan legal. Keterpaksaan untuk mendapat penghasilan membuat kejahatan tidak menghiraukan resiko yang dihadapinya bila tertangkap (Oktarina, 2020). Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan

norma yang ada sehingga mengakibatkan ketidakselarasan dalam kehidupan (Fachrurrozi et al., 2021).

Hal ini disebabkan kecenderungan untuk tidak memperoleh pengetahuan tentang hukum maka dapat memberikan peluang yang besar untuk melakukan tindakan kejahatan (Fachrurrozi et al., 2021). Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila jumlah penduduk miskin bertambah maka tingkat kriminalitas di suatu daerah akan meningkat juga. Kecenderungan seseorang yang hidup miskin lebih beresiko untuk melakukan tindak kejahatan (Fachrurrozi et al., 2021).

Berikut data Tingkat Pengangguran, Kemiskinan terhadap jumlah Kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022.

Tahun	Tingkat Pengangguran(%) (X ₁)	Tingkat Kemiskinan (%) (X ₂)	Kriminalitas (Kasus) (Y)
2017	4,39	13,19	989
2018	4,23	12,80	628
2019	4,53	12,71	670
2020	5,51	12,66	498
2021	4,98	12,84	515
2022	4,63	11,90	237

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023.

Berdasarkan tabel 1 tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2017-2022 selalu berfluktuasi, jika dilihat pada tahun 2020 tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,98 persen poin atau 5,51 persen. Hal ini dikarenakan adanya penyebaran virus covid-19 dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2019. Secara absolut, angka pengangguran di Sumatera Selatan pada tahun 2020 masih relatif tinggi yaitu sebesar 238,363 orang, dimana 5,51

persen diantaranya belum pernah bekerja. Sementara ditahun 2021 menurun menjadi 4,98 persen, dan di tahun 2022 tingkat pengangguran menurun lagi menjadi 4,63 persen.

Hal ini menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung oleh lapangan kerja yang ada, sehingga menyebabkan mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Hal lain yang turut mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Selatan adalah perkembangan keadaan perekonomian secara global (BPS, 2020).

Secara umum, pengangguran disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah pekerjaan yang tersedia atau lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja (Basrowi et al., 2018)

Jika dilihat pada tabel 1 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan sebesar 13,19% dan di tahun 2018 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 12,80%, dan ditahun 2019 penurunan sebesar 12,71%, dan ditahun 2020 pun mengalami penurunan kembali menjadi 12,66% hal ini dikarenakan bahwa pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintahan Kab/Kota Sumatera Selatan telah bersinergi dalam melaksanakan berbagai program perlindungan sosial (bantuan sosial, kegiatan ekonomi produktif, dll) sehingga penduduk hampir miskin tidak jatuh miskin akibat pandemi covid-19, bahkan penduduk miskin di Sumatera Selatan ada yang berhasil keluar dari kemiskinan, yang menunjukkan kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik melalui intervensi berbagai program perlindungan sosial (BPS, 2021). Namun pada

tahun 2021 mencapai 1.113,76 ribu orang atau sebesar 12,84 % dari total penduduk hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ketenagakerjaan yang semakin sulit yang disebabkan adanya penyebaran covid-19 yang akhirnya menyebabkan banyak pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan karena pengaruh kenaikan harga komoditas. Namun pada tahun 2021 harga eceran komoditas pokok mengalami kenaikan seperti halnya daging sapi, susu kental manis, minyak goreng dan tepung (BPS, 2021). Kemudian pada tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 11,90%. Badan Pusat Statistik mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan definisi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Selain itu faktor pengangguran juga berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Pengangguran tercipta akibat penambahan pekerjaan yang lebih rendah dari pertumbuhan jumlah tenaga kerja (BPS, 2023).

Kriminalitas bisa terjadi dari perkotaan maupun pedesaan. Di Provinsi Sumatera Selatan hampir semua wilayah di Provinsi Sumatera Selatan memiliki kasus tindak kriminalitas. Menurut data kriminalitas (pencurian dengan kekerasan) dalam Badan Pusat Statistik Kriminalitas 2021 Provinsi Sumatera Selatan terdapat jumlah tindak kasus kriminalitas (pencurian dengan kekerasan). Berdasarkan tabel 1 ada 989 kasus di tahun 2017, dan menurun di tahun 2018 menjadi 628 kasus, dan pada tahun 2019 kasus kriminalitas menaik menjadi 670 kasus, dan di tahun 2020 menurun menjadi 498 kasus kriminal yang terjadi, dan di tahun 2021 kembali

menaik menjadi 515 kasus dan di tahun 2022 kasus kriminalitas menurun menjadi 237 kasus.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa angka kriminalitas dari tahun 2007-2022 mengalami fluktuasi, kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Kesuksesan pembangunan yang digalakkan oleh setiap negara sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Peran aktif dan dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan akan optimal jika kriminalitas bisa ditekan serendah-rendahnya. Berbagai kerugian telah banyak ditimbulkan oleh adanya tindak kriminal, baik itu kerugian ekonomi, fisik, moral dan psikologis (Wulansari, 2017)

Angka kriminalitas yang tinggi akan menimbulkan kegelisahan dan mengganggu kondusifitas di masyarakat. Maka dari itu angka kriminalitas menjadi sangat penting dan menarik untuk diangkat menjadi topik penelitian, karena rasa aman (*security*) juga merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, karena saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya (Wulansari, 2017)

Untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas

termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Wulansari, 2017)

Banyak para peneliti menyakini penyebab utama munculnya kriminalitas ini karena faktor ekonomi, dapat ditinjau dari jumlah pengangguran dan kemiskinan, sedangkan faktor eksternal. Selain kemiskinan, pengangguran berkontribusi dalam timbulnya masalah kriminalitas. Banyak faktor seseorang menjadi pengangguran seperti kebijakan upah minimum, siklus bisnis yang tidak pasti, rendahnya lapangan kerja, ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan pendidikan seseorang (Fachrurrozi et al., 2021). Seseorang yang sebelumnya sudah memiliki pekerjaan lalu menjadi pengangguran maka ia kehilangan sejumlah pendapatan. Memulai kembali mendapatkan pekerjaan tentu tidaklah mudah karena ia harus bersaing dengan para pencari kerja lainnya dengan lapangan kerja yang sedikit. Melihat hambatan-hambatan ini maka pengangguran memiliki peluang untuk melakukan kriminalitas (Khan et al., 2015).

Penduduk tergolong miskin inilah yang memiliki peluang besar untuk melakukan kejahatan. Ditengah keterbatasan ekonomi mereka masih harus memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehingga sebagian penduduk miskin lebih memilih pekerjaan yang ilegal dan cukup berisiko. Namun, menghasilkan pendapatan yang lebih besar bila dibandingkan dari pekerjaan legal. Keterpaksaan untuk mendapat penghasilan membuat kejahatan tidak menghiraukan resiko yang dihadapinya bila tertangkap (Oktina, 2020).

Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Pakistan. Semakin meningkat kemiskinan cenderung akan meningkatkan angka kriminalitas di suatu Negara (Khan, 2015). Kemiskinan dapat menyebabkan tingkat stres dan menyebabkan individu mengadopsi perilaku kriminal untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun terdapat penelitian lain yaitu dimana kemiskinan berhubungan negatif terhadap kriminalitas, karena dengan naiknya angka kemiskinan mengharuskan orang untuk semakin bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menekan tindakan kejahatan (Prayetno, 2013).

Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin rendah tindak kriminal, karena dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tingginya penduduk miskin mengharuskan orang untuk bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga menekan terjadinya tindak kejahatan kriminalitas.

Berdasarkan penjelasan, uraian dan fenomena-fenomena yang ditemukan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam seberapa besar **“Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh tingkat pengangguran (X_1) dan tingkat kemiskinan (X_2) terhadap kriminalitas (Y) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2022 baik secara simultan maupun parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2022 baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas antara lain:

a) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman penulis tentang pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2022 dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

b) **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap kriminalitas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007-2022.